

Telan Anggaran Rp103 Miliar



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,21/05/2024

➤ Kesbangpol Kukar Sebut Hibah Pilkada Sudah Lunas

TENGGARONG, TRIBUN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar), Rinda Desianti mengungkapkan, Pemkab Kukar telah melunasi pembayaran dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ia mengatakan pembayaran yang dilakukan dalam dua tahapan tersebut tuntas dilakukan pada Maret 2024. Tahap pertama disalurkan pada tahun 2023, Pemkab Kukar merealisasikan 40 persen anggaran Pilkada. Sedangkan sisanya sebesar 60 persen telah dicairkan belum lama ini. “Maret sudah kami cairkan, jadi tidak ada lagi utang pemerintah untuk Pilkada pada anggaran hibah 2024. Semua sudah kami bayarkan,” kata Rinda kepada TribunKaltim.co, Senin (20/5/2024).

Sebagaimana diketahui, pembayaran dana hibah Pilkada 2024 diberikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pembayaran dana hibah Pilkada direalisasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar dengan anggaran mencapai Rp103 miliar. Nilai ini dibagi sesuai usulan yang telah diverifikasi. Selain itu, Pemkab Kukar juga sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bawaslu dan KPU. Rinda menyebutkan, pencairan dana hibah tak hanya diberikan kepada KPU dan Bawaslu Kukar saja. Dana hibah Pilkada 2024 ini juga ditransferkan ke rekening Polres Kukar, Polresta Bontang, Kodim 0906/KKR dan Kodim 0908/BTG untuk pengamanan. Seharusnya dana hibah Pilkada sudah bisa dicairkan sejak Januari. Hanya saja, kondisi saat itu masih dihadapkan dengan persiapan Pilpres dan Pileg yang akan dilaksanakan pada 14 Februari.

“Terus anggota KPU juga masih yang lama, sementara mereka akan melakukan pergantian,” sebutnya.

Adapun total dana hibah yang diterima KPU Kukar sebesar Rp76 miliar dengan rincian tahap I senilai Rp30 miliar dan tahap II Rp46 miliar. Kemudian Bawaslu Kukar totalnya Rp15 miliar yang rincian tahap I Rp7 miliar dan tahap II Rp8 miliar.

Pemkab Kukar juga sudah menyiapkan dana hibah untuk pengamanan Pilkada 2024 dengan rincian Polres Kukar Rp8 miliar, Kodim 0906/KKR Rp2 miliar, Polresta Bontang Rp1,2 miliar, Kodim 0908/BTG Rp624 juta. **(aul)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Telan Anggaran Rp103 Miliar, 21/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2020, diatur sebagai berikut:
 - (1) Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Dalam Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.